

## ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Kasus Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)” ini ditulis oleh Moh. Ro’uf Amin, NIM. 2822133010, Pembimbing Dr. H. M. Darin Mu’alifin, SH., M. Hum

Kata Kunci : Main Hakim Sendiri, Hukum Positif, Hukum Islam, Desa Tlumpu

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena main hakim sendiri yang terjadi di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. masih banyak orang melakukan tindak pidana yang kemudian pada ujungnya orang tersebut menjadi korban penganiayaan oleh masyarakat. Pada dasarnya masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dilakukan atas kehendaknya sendiri sebagai pelampiasan kekesalan. Bahkan sering terjadi tindakan penganiayaan (main hakim sendiri) oleh masyarakat terhadap orang lain (salah orang) yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan seperti ini tidak selaras dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus berlandaskan hukum. Perbuatan main hakim bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan dan berdasar hukum, tidak ada suatu undang-undang atau peraturan yang membenarkan perbuatan tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa tindakan main hakim tersebut mempunyai suatu konsekuensi hukum yang besar. Hal tersebut juga terjadi di masyarakat Desa Tlumpu, Blitar.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar? (2) Bagaimana fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dalam perspektif Hukum Positif? (3) Bagaimana fenomena main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dalam perspektif Hukum Islam?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ingin memberikan suatu pemahaman tentang mengapa masyarakat pada umumnya melakukan tindakan menghakimi sendiri apabila seseorang tertangkap basah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis penelitian dengan melibatkan diri secara langsung mengamati proses persidangan. Sedangkan wawancara dan dokumentasi digunakan untuk menggali data yang lebih spesifik terkait dengan factor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Tlumpu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Blitar Kota dilatarbelakangi karena rasa emosi masyarakat yang telah lama dipendam, rasa kurang percaya (*trust*) kepada aparat

penegak hukum dalam menangani masalah tindak pidana, kurangnya dialog antara elemen masyarakat, dan hilangnya identitas masyarakat ketika menanggapi masalah tindak pidana di sekitarnya. Ketentuan Pasal 170 KUHP dalam memberikan hukuman kepada pelaku main hakim sendiri sebenarnya sudah diterapkan ketika masalah tersebut sudah melampaui norma dan hukum yang berlaku. Menurut aparat pemerintahan desa dan beberapa pelaku main hakim sendiri, tindakan tersebut memang perlu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana lain. Catatannya adalah tindakan tersebut (main hakim sendiri) dilakukan dengan tidak sampai menghilangkan nyawa. Ketika tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk membela diri karena terdesak, maka tindakan tersebut dibolehkan. Sebagaimana penjelesan dari Iptu Sujarwo, SH selaku Kanit Reskrim Polres Blitar Kota menjelaskan tentang Pasal 49 KUHP. Sedangkan menurut hukum Islam sendiri, perbuatan main hakim termasuk ke dalam tindakan penganiayaan yang hukumannya masuk ke dalam *qishah* yang dijatuhkan atau diputuskan oleh pemerintah.

## ABSTRACT

Thesis title "The case of Vigilantism in the perspective of positive law and Islamic law (case study in the village of Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Blitar Town) "this was written by Moh. Ro'uf Amin , NIM. 2822133010, Supervising Dr. H. M. Darin Mu'alifin, SH, m. Hum.

Keywords: Vigilante, Positive Law, Islamic Law, Village Tlumpu

This event will be based on Research by the phenomenon of vigilantism that occurred in the village of Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Blitar. many people still perform a criminal act then in the end the person becoming a victim of persecution by the community. The community is essentially doing vigilante action (*eigenrichting*) made on his own will as an impingement pique. Even frequent acts of persecution (vigilantism) by the community against others (incorrectly) that up to result in the victim's death. The act like this is not in tune with the sound of article 1 paragraph (3) UUD 1945 which reads: "the State of Indonesia is a country of laws", so any legal deed performed must be based on the law. The deeds of the main judge is not a deed which justified and based on the law, there is no legislation or regulation that justifies such a feat. Still many people who do not yet know that the main action the judge had a legal consequences. It also occurred in the community of the village of Tlumpu, Blitar.

The focus of the research in this thesis are (1) How the phenomenon of vigilantism in the village of Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Blitar Town? (2) How the phenomenon of vigilantism in the village of Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Blitar in the perspective of positive law? (3) How the phenomenon of vigilantism in the village of Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Blitar in the perspective of Islamic law?

As for the goals of this research is want to provide an understanding of why society in General take action to judge yourself when someone is caught committing a criminal offence.

In this study used methods of observation, interview and documentation. Observations are used to make it easier for researchers to do research analysis by involving themselves directly observed the trial proceedings. While the interview and documentation used to dig into the more specific data related to the causative factor of vigilante action by the community Tlumpu.

The results showed that vigilante behavior in the village of Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Blitar Town effected because of the emotion of a society that has long been landfilled, the less trust (*the trust*) to law enforcement agencies in addressing the issue of crime, the lack of dialogue between the elements of the

society, and the loss of the community's identity when responding to the problem of crime in the vicinity. The provisions of article 170 of the KUHP provides the punishment to perpetrators of vigilantism in fact already applied when the problem has already exceeded the norms and applicable law. According to village government apparatus and some perpetrators of the vigilante, such action is indeed necessary in order to provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts of others. It is these actions (vigilantism) done by not to eliminate lives. When the Act was committed with the intent to defend themselves because of the desperate, then such action is allowed. As rather simplistic explanation of Iptu Sujarwo, SH as Kanit Reskrim Polres Blitar Town explaining about article 49 of the KUHP. While according to Islamic law itself, the main judge in the Act of persecution that the punishment goes into *qishah* that dropped or decided by the Government.